

JEJAK PERKEMBANGAN SISTEM PERS INDONESIA

Sri Hadijah Arnus

(Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah IAIN Kendari)

Abstrak: Media massa merupakan komponen utama pers, yang merupakan jembatan informasi bagi pemerintah dan masyarakat. Pers juga dapat menjadi kontrol sosial dalam masyarakat. Pers selalu berpijak pada sistem pers yang dianutnya, sedangkan sistem pers selalu dipengaruhi oleh sistem politik di negara dimana pers tersebut berada. Perkembangan politik di Indonesia turut membawa perubahan terhadap pers di negara ini. Diawali pada masa orde baru dimana pers Indonesia menganut sistem pers otoritarian, dimana pers hanya menjadi corong pemerintah. Runtuhnya orde baru menjadi angin segar bagi pers di Indonesia, terjadi banyak reformasi di bidang pers. Era Habibie, Gusdur, dan Megawati merupakan awal dari perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Pers yang ideal dicapai pada masa pemerintahan SBY, dimana pemerintah tidak mencampuri pers dalam melakukan kegiatannya, dilain pihak pers juga menjalankan pers yang bertanggung jawab, dimana tetap memegang prinsip kebebasan, tetapi tetap berpedoman pada norma-norma yang berlaku. Iklim pers era SBY yang kritis dan konstruktif, diharapkan dapat terus berlangsung, bahkan lebih maju lagi pada era Jokowi yang baru saja menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara, yang tentunya akan mengukir sejarah baru dalam perkembangan pers di Indonesia.

Kata Kunci: media massa, pers.

Pendahuluan

Berbicara tentang pers tidak dapat terlepas dari media massa yang merupakan salah satu komponennya. Pers merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat yang menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah, melalui media massa. Dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia (id.m.wikipedia.org/wiki/pers_indonesia)

Pers sangat identik dengan media massa sebagai komponen utamanya. Marshall Mc. Luhan dalam Nurudin (2003) menyebut media massa sebagai *the exetension of man* (media adalah eksistensi manusia), dengan kata lain, media adalah perpanjangan dan perluasan dari kemampuan jasmani dan rohani manusia. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap perasaan manusia bisa disebarkan melalui pers. Pers dapat pula menjadi penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau penguasa demikian pula sebaliknya pers dapat menjadi corong untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan disampaikan kepada masyarakat. Berita tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat Indonesia melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Demikian pula sebaliknya, tanggapan, aspirasi, keinginan, pendapat masyarakat tentang kebijakan tersebut dapat diketahui oleh pemerintah melalui media massa, misalnya saja terjadi aksi demonstrasi oleh mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga BBM tersebut, kemudian diliput oleh wartawan dan ditayangkan di media massa ataupun melalui *polling* atau jajak pendapat yang sering dilakukan oleh media massa, untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap suatu isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat.

Selain menjadi jembatan informasi dari masyarakat ke pemerintah atau sebaliknya, pers juga memiliki fungsi hiburan, pendidikan, transformasi budaya, dan melakukan sebuah kontrol sosial dalam masyarakat. Masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan melalui segala kegiatan yang dilakukan oleh presiden dan pejabat

negara lainnya, hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Richard Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1972 yang dikenal dengan kasus Watergate, dimana kasus ini telah mengubah banyak praktik politik dan jurnalisme di Amerika Serikat, kasus ini juga telah membuat mundurnya Presiden Richard Nixon, satu-satunya presiden Amerika Serikat yang mengundurkan diri dalam masa jabatannya. Terungkapnya skandal Watergate yang melibatkan orang nomor satu di Amerika Serikat pada masa tersebut tidak lepas dari peran dua wartawan *The Washington Post* Bob Woodward dan Carl Bernstein yang secara rutin melakukan wawancara dengan sumber misterius Deep Throat yang diduga adalah wakil kepala FBI, Mark Felt, tetapi ada juga media yang menuliskan bahwa Deep Throat itu adalah presiden Nixon itu sendiri, dari tulisan hasil wawancara wartawan tersebut, melaporkan adanya fakta-fakta keterlibatan Presiden Nixon dalam kasus Watergate. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa betapa pers memiliki kekuatan dalam membongkar kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa tertentu, dan dapat memiliki kekuatan dalam mengontrol kecuangan-kecurangan yang ada di masyarakat atau hal-hal yang merugikan masyarakat.

Sistem Pers

Fred Siebert, Wilbur Scramm, dan Theodore Peterson dalam bukunya *Four theories of the press* mengamati setidaknya ada 4 kelompok besar teori sistem pers, yakni sistem pers otoriter (authoritarian), sistem pers liberal (libertarian), sistem pers komunis (marxist), dan sistem pers tanggung jawab sosial atau *social responsibility* (Nurudin, 2003).

1. Pers Otoritarian

Sistem pers otoriter dikenal sebagai sistem tertua, yang lahir sekitar abad 15-16 pada masa pemerintahan absolut. Pers dalam sistem ini berfungsi sebagai penunjang negara (kerajaan) untuk memajukan rakyat. Pemerintah menguasai sekaligus mengawasi media. Berbagai kejadian yang akan diberitakan, dikontrol pemerintah karena kekuasaan raja sangat mutlak. Negara (dengan raja sebagai penguasa) adalah pusat segala kekuatan. Oleh karena itu, individu tidak penting, yang lebih penting adalah negara sebagai tujuan akhir individu. Mussolini (Italia)

dan Adolf Hitler (Jerman) adalah dua penguasa yang menguasai sistem persotoriter (Nurudin, 2008).

2. Pers Libertarian

Berkembang pada abad 17-18 sebagai akibat munculnya revolusi industri, dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara barat yang sering disebut *aufklarung* (pencerahan). Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan akal dan bisa mengatur sekelilingnya untuk tujuan yang mulia. Kebebasan adalah hal yang utama dalam mewujudkan esensi dasar itu, sedangkan kontrol pemerintah dipandang sebagai manifestasi “pemeriksaan” kebebasan berpikir. Oleh karena itu, pers harus diberi tempat yang sebebaskan-bebasnya untuk membantu mencari kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan sehingga kebebasan pers menjadi tolak ukur dihormatinya hak bebas yang dimiliki manusia (Nurudin, 2008).

3. Pers Tanggung Jawab Sosial

Sistem pers tanggung jawab sosial (*social responsibility*) muncul pada awal abad ke-20 pula sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat, dasar pemikiran sistem ini adalah sebebaskan-bebasnya pers harus bias bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan. Sistem ini muncul di Amerika Serikat ketika kebebasan yang telah dinikmati oleh pers Amerika selama dua abad lebih, dinilai harus diadakan pembatasan atas dasar moral dan etika.

Penekanan pada tanggung jawab sosial dianggap penting untuk menghindari kemungkinan terganggunya ketertiban umum. Menurut Peterson kebebasan pers harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern selama ini sistem ini juga lebih menekankan pada kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi (Nurudin, 2008).

4. Pers Komunis

Sistem ini juga sering disebut sistem pers totaliter Soviet (*Soviet Totalitarian*) atau pers komunis Soviet berkembang karena munculnya

Negara Uni Soviet yang berpaham komunis pada awal abad ke-20. Sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi bagian integral dari negara. Pers menjadi alat atau organ partai yang berkuasa (partai komunis Uni Soviet/PKUS). Dengan demikian, segala sesuatu ditentukan oleh negara (partai). Kritik diijinkan sejauh tidak bertentangan dengan ideology partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai yang ditentukan oleh pimpinan PKUS. Bagi Lenin (penguasa Uni Soviet waktu itu), pers harus melayani kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yakni proletar. Pers harus menjadi *collective propagandist, collective agitator, collective organizer*. Adapun kaum proletar diwakili oleh partai komunis. Fungsi pers adalah indoktrinasi massa, pendidikan atau bimbingan massa yang dilancarkan partai (Nurudin, 2008)

Dari uraian di atas mengenai sistem pers dapat kita simpulkan bahwa sistem pers yang ada di Indonesia merupakan sistem pers tanggung jawab sosial, meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sistem pers Indonesia menanut sistem pers pancasila yaitu sistem pers yang bebas, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan UUD 45, tetapi banyak yang berpendapat bahwa sistem pers pancasila tersebut merupakan topeng dari sistem pers otoritarian yang dianut oleh pemerintah orde baru pada masanya. Idealnya pers Indonesia adalah pers yang bebas, tetapi tetap berada dalam jalur aturan dan norma-norma kemasyarakatan yang dianut oleh budaya Indonesia.

Era Perkembangan Pers Indonesia

Apabila kita membahas mengenai pers, maka isu yang utama yang terkait adalah kebebasan pers, atau otonomi pers dalam mengolah pemberitaannya serta posisinya sebagai salah satu lembaga dalam masyarakat. Nurudin (2008) mengatakan dalam suatu masyarakat terdapat suatu hubungan trikotomi, yaitu hubungan yang bertolak belakang antara tiga pihak, dalam hal ini pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang, oleh karena itulah disebut dengan hubungan trikotomi. Hal tersebut wajar saja terjadi karena masing-masing pihak memiliki tujuan dan tuntutan yang berbeda, dinamika hubungan diantara ketiga unsur tersebut yang menjadikan pers akan berbeda menurut masanya yang selalu dipengaruhi oleh pemerintah yang tengah berkuasa.

1. Pers Era Orde Baru

Era orde baru atau biasa juga identik dengan era kepemimpinan Soeharto. Pers Indonesia zaman orde baru tunduk pada sistem politik atau pemerintah, pada masa ini sebuah perusahaan pers yang akan didirikan harus memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang diatur dalam Permenpen No.01/Pers/Menpen 1984, yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan (DEPPEN), hal ini dapat dinilai bahwa pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers, padahal dalam UU Pokok Pers No. 11 tahun 1996 mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan. Apalagi kedudukan Undang-Undang seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan Permenpen.

Diberikannya izin pendirian pers oleh DEPPEN didasarkan pada prinsip *like or dislike*, sama halnya kewenangan pemerintah dalam “menertibkan” SIUPP, apabila dianggap perusahaan penerbitan pers tersebut melanggar peraturan penyiaran ataukah menayangkan tayangan yang membahayakan perintahan, dan mengganggu stabilitas negara, dapat dibredel (pencabutan izin penyiaran) oleh DEPPEN tentu saja atas perintah presiden. Misalnya saja tayangan yang mengkritik pemerintah atau presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua ini dimungkinkan dengan alasan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pers, sedangkan ketua Dewan Pers itu sendiri adalah Menteri Penerangan. Hal ini mengakibatkan pers menjadi sangat hati-hati dalam pemberitaannya, banyak menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diungkapkan kepada masyarakat, sehingga pers pada saat itu kehilangan fungsinya sebagai kontrol sosial, alhasil, pers menjadi berat sebelah dan kehilangan otonominya, pers pada masa ini terkesan menjadi corong pemerintah dalam menyiarkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan.

Besarnya dominasi pemerintah terhadap pers dapat dilihat dari pembredelan media Tempo, Editor, dan DeTIK pada tanggal 21 Juni 1994, yang ingin memelihara otonominya, tetapi tidak kuasa melawan keperkasaan negara. Hal ini disebabkan oleh laporan media tersebut tentang impor kapal perang dari Jerman yang dilakukan oleh B.J Habibie yang diduga melakukan *mark-up* harga kapal impor tersebut. Pemberitaan tersebut membuat Soeharto marah besar dan memerintahkan Harmoko (Mentri Penerangan saat itu) untuk

melakukan pembredelan terhadap ketiga media tersebut tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Pada masa orde baru, pembentukan organisasi kewartawanan juga sangat dibatasi, pada zaman tersebut hanya ada satu organisasi yaitu PWI (persatuan wartawan Indonesia) yang dicap sebagai organisasi wartawan yang berada dibawah ketiak pemerintah. Pasca kasus pembredelan majalah Tempo, Editor, dan DeTik terbentuklah AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) yang merupakan wujud ketidakpuasan terhadap PWI.

2. Pers Era Habibie

Runtuhnya Rezim Soeharto pada tahun 1998 yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia, membuat banyak perubahan dalam segala sendi kehidupan dan pemerintahan di Indonesia, tidak terkecuali pada sistem pers, pers yang dulunya dibawah kendali pemerintah atau tunduk pada sistem politik, kini mulai mendapatkan “angin segar” dengan dicabutnya peraturan penggunaan SIUPP (surat ijin usaha perusahaan pers) karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, pengurusan untuk mendirikan perusahaan/penerbit pers tidak lagi bertele-tele dan melewati birokrasi yang sangat rumit. Hal ini membawa angin segar bagi masyarakat untuk mendirikan perusahaan media. Dalam waktu singkat pasca pencabutan SIUPP tersebut, perusahaan media di Indonesia tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Demikian pula halnya dengan munculnya beberapa organisasi kewartawanan yang dahulu hanya memiliki satu wadah tunggal yaitu PWI (persatuan wartawan Indonesia).

Kebebasan pers yang baru saja dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada era Habibie ini tentunya mendatangkan beberapa dampak. Kebebasan pers yang berarti kebebasan dalam menayangkan berbagai berita tidak hanya mendatangkan dampak yang positif saja tetapi juga mendatangkan dampak yang negatif. Kebebasan dalam pemberitaan mengakibatkan terjadinya *trial by the press* (pengadilan oleh pers) yaitu berita atau tulisan dengan gambar tertuduh dalam suatu perkara pidana yang memberi kesan bersalah. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah dan menyulitkan tertuduh untuk memperoleh pemeriksaan pengadilan yang bebas dan tidak berpihak (Nurudin, 2008:79).

Selain melakukan *trial by the press* media di Indonesia yang tengah merasakan euforia juga kurang memiliki *self censorship*, yaitu keadaan dimana media kurang mempertimbangkan selera dari masyarakat, media kurang ideal dalam tayangannya, dan kurang mempertimbangkan apakah tayangan tersebut layak atau tidak ditayangkan untuk masyarakat, misalnya saja banyak media baru yang hanya memberitakan tentang politik, demokrasi, demonstrasi dan sejenisnya, akan tetapi tidak semua masyarakat tertarik akan hal tersebut, masyarakat butuh berita hiburan, budaya, interaksi sosial dan lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena pers Indonesia baru saja menghirup udara segar kemerdekaan, sangat liar, akan tetapi kurangnya *self censorship* tersebut mengakibatkan media-media baru tersebut terseleksi dengan sendirinya, akhirnya banyak media yang “gulung tikar” karena tidak mampu menghidupi perusahaannya.

3. Pers era Gusdur dan Megawati

Tampak pemerintahan pasca pemerintahan Habibie dilanjutkan oleh Gusdur dan Megawati. Pada era Gusdur ini, Departemen Penerangan (DEPPEN) yang selama ini menjadi salah satu momok bagi kebebasan pers di Indonesia dihapuskan, meskipun sebelumnya pada era Habibie, penghapusan SIUPP sudah dilakukan, tetapi bayangan akan otoritarianisme pemerintah terhadap pers masih ada, yaitu DEPPEN. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimana DEPPEN memiliki kewenangan dalam menentukan nasib perusahaan pers dan hal ini bukan tidak mungkin akan berulang lagi. Menurut Nurudin (2008: 87) alasan penghapusan DEPPEN oleh Gusdur dapat ditinjau sebagai berikut; *pertama*, kebebasan pers masih sulit untuk diwujudkan apabila masih ada DEPPEN yang merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintah yang lebih merupakan representasi penguasa dibandingkan sebagai lembaga independen yang bertugas sebagai fasilitator informasi pemerintah-masyarakat. *Kedua*; untuk melihat apakah pers mampu untuk menjaga kebebasan yang telah diberikan, kebebasan yang telah diperjuangkannya, apabila ternyata pers tidak mampu untuk menjaga kebebasan yang telah diberikan, maka penyebabnya adalah pers itu sendiri bukan pemerintah. *Ketiga*; apabila pers bermasalah dengan kebebasannya maka seharusnya diselesaikan di pengadilan, bukan diselesaikan dengan kebijakan politis (tanpa

peringatan terlebih dahulu, sepihak, dan tidak adil) seperti yang dilakukan oleh DEPPEN pada era Soeharto.

Pasca dihapuskannya SIUPP dan DEPPEN banyak perusahaan media yang gulung tikar hal ini sangat disayangkan, saat itu seharusnya lebih banyak perusahaan penerbitan media yang muncul. Banyaknya media yang “tumbang”, menjadi akhir dari masa “bulan madu” media di Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi yang semakin berkembang membuat perilaku khalayak media juga berubah, akhirnya banyak media cetak beralih ke media online, sebut saja www.kompas.com, www.detik.com, www.astaga.com, dan lain sebagainya. Selanjutnya dimuailah era media online, yang saat ini sudah menjadi konsumsi utama di kalangan masyarakat Indonesia.

4. Pers era Susilo Bambang Yudoyono (SBY)

Pers era SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sebuah perpaduan ideal antara kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (insan pers), khususnya untuk tidak berbuat semena-mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (*the power of the press*). (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0409/29/opi3.htm>).

Meskipun pers di era SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab, tetapi tidak mengurangi kebebasan pers pada saat itu, pemerintah tidak pernah ikut campur mengenai urusan kebebasan pers. Dibawah kepemimpinan SBY selama satu dasawarsa pers Indonesia benar-benar telah menikmati kebebasannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Jacob Oetama dalam kompasiana.com, bahwa kemerdekaan pers di era SBY lebih baik dibandingkan dengan pemeritahan sebelumnya. Pers yang kritis dan konstruktif pada masa SBY harus tetap dipertahankan di era Presiden Jokowi.

Hubungan pers dan presiden di era SBY dapat diibaratkan sebagai hubungan benci tapi rindu, dimana hubungannya dengan pers turun naik tetapi tetap hangat, presiden SBY pada awal pemerintahannya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai media, tetapi di saat yang lain media juga mengkritik presiden SBY dengan sangat kritisnya. Siapapun yang menjadi presiden di negara demokratis tentu akan merasakan suasana tersebut. Walaupun media pers sering mengkritik dengan kerasnya, presiden SBY ternyata tidak pernah membenci atau mengambil jarak dengan pers. Presiden SBY

tetap proporsional tenang dan setiap pernyataan, namun tetap menampilkan kehangatan. Kritikan tersebut menurut SBY dapat menghindarkan dirinya dari penyalahgunaan kekuasaan dan penyalur berbagai ketidakpuasan masyarakat. Hubungan hangat dengan pers turut membangun sebuah kebebasan pers tanpa takut untuk menyampaikan pendapat (Susilo Bambang Yudoyono dalam www.kompasiana.com).

Pada masa akhir masa pemerintahan SBY perkembangan media berita online sangat pesat, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat sangat faktual, dan transparan, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan jalannya pemerintahan dan dapat memberikan *feedback* yang lebih cepat terhadap situasi yang tengah berlangsung.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pers sangat penting bagi kemajuan negara, pers dapat mengantarkan negara menjadi maju dengan banyak perannya, akan tetapi kadangkala pers tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena terbentur oleh kebijakan pemerintah. Pers yang baik akan mengantarkan kepada masyarakat yang baik, pers yang buruk akan mengantarkan masyarakat ke era yang buruk.

Pers era Habibie, Gusdur, dan Megawati walaupun telah mengalami masa kemerdekaan pers yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, tetapi pers pada masa tersebut masih dalam kendali samar pemerintah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa era Habibie, Gusdur dan Megawati merupakan era kemajuan kebebasan pers di Indonesia, walaupun pers era ketiga presiden itu terkesan cenderung kebablasan.

Pers dari Sudut Pandang Islam

Islam tidak memberikan larangan bagi kegiatan pers. Pers dalam dari sudut pandang Islam menitikberatkan pada penyampaian informasi yang menyangkut pesan-pesan keagamaan yang memuat pesan-pesan kebaikan agar lebih taat kepada Allah SWT, kegiatan pers dalam Islam bertujuan untuk berdakwah mengenai ajaran-ajaran Islam, untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dan mengerjakan perintahnya.

Saat ini di Indonesia telah banyak media massa baik itu cetak maupun elektronik yang mengkhususkan siarannya untuk dakwah, yaitu tayangan-tayangan yang berisi ceramah keagamaan, tayangan-

tayangan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap segala tindakan dan aktivitas dalam kehidupan keseharian kita. Tentu saja jenis tayangan tersebut akan menambah pengetahuan masyarakat tentang Agama Islam.

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied, 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. PT. Rajawali Pers.
- Nurudin, 2008. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2008. *Komunikasi Massa*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ardianto, Elvinaro dan Komala, Lukita Erdinaya. 2004. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Remaja Rosdakara.
- Vivian, John. 2008. *Teori komunikasi Massa, Edisi Kedelapan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Severin, J. Werner dan Tankard, W. James. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa, Edisi Kelima*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- [Id.m.wikipedia.org/wiki/pers_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pers_Indonesia)
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0409/29/opi3.htm>
- www.kompasiana.com
- <http://kapita-fikom-915070049.blogspot.com/2010/08/kebebasan-pers-di-indonesia.html>
- <http://wildan-hakim.blogspot.com/2008/11/kebebasan-pers-di-era-reformasi.html>